



**LAPORAN KEUANGAN AUDITED DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
KECAMATAN GAMBIR**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Camat sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya

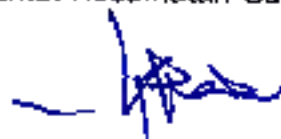
Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah entitas akuntansi dan entitas penggabung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 15 Juni 2026

Camat Kecamatan Gambir.



M. Iqbal

NIP 197604061994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Sistematis Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	6
2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	8
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	9
2.2.2 Capaian Kinerja Kelangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	11
BAB III KEBUAKAN AKUNTANSI	12
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.3 Basis Pengukuran dan Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	15

3.4	PENERAPAN KEBIAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	38
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	39
4.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	39
4.1.1	PENDAPATAN DAERAH	39
4.1.2	BELANJA	40
4.2	NERACA	44
4.2.1	ASET	44
4.2.2	KEWAJIBAN	55
4.2.3	EKUITAS	57
4.3	LAPORAN OPERASIONAL	57
4.3.1	PENDAPATAN LO	57
4.3.2	PERBAH	58
4.4	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	62
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	64
5.1	STRUKTUR ORGANISASI	64
5.2	RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	64
5.3	TUGAS POKOK	65
BAB VI	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	ANGGARAN BELANJA PER 31 DESEMBER 2025	6
TABEL 2.2	REALISASI BELANJA PER 31 DESEMBER 2025	7
TABEL 4.1	REALISASI BELANJA PERIODE 31 DESEMBER 2025	41
TABEL 4.2	DAFTAR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025	52
TABEL 4.3	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	60
TABEL 4.4	RINCIAN SALDO UTANG BELANJA	60
TABEL 4.5	REKAP BEBAN	64
TABEL 4.6	RINCIAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025	68

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	REALISASI DAN KOMPOSISI REALISASI BELANJA	9
----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka penyajian dan pengungkapan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Gubernur 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat yang disajikan terdiri dari :

a. **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu

b. **Neraca**

Laporan Neraca Lebih menyajikan informasi terkait posisi keuangan pada periode tertentu yang merinci aset, kewajiban / utang dan ekuitas.

c. **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

d. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I** : Bensi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

-
- BAB II** : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, capaian kinerja keuangan dan outcome/output, capaian kinerja keuangan dan sasaran strategis, capaian kinerja keuangan dan sasaran program serta capaian kinerja keuangan dan sasaran kegiatan.
- BAB III** : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV** : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan perubahan ekuitas, komponen-komponen neraca, dan komponen-komponen laporan arus kas.
- BAB V** : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.
- BAB VI** : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

BAB II**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 2.124.520.438,00 terdiri dari :

Tabel 2.1 Anggaran Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00
BELANJA DAERAH	2.124.520.438,00
BELANJA OPERASI	1.905.519.288,00
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.905.519.288,00
BELANJA MODAL	219.001.150,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.001.150,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.124.520.438,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(2.124.520.438,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN BELANJA	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00
BELANJA DAERAH	1.974.393.877,00
BELANJA OPERASI	1.762.172.862,00
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.762.172.862,00
BELANJA MODAL	212.217.015,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.217.015,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.974.393.877,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(1.974.393.877,00)

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.974.393.877,00 atau 92,93% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp2.124.520.438,00. Dengan demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp 150.26.561,00 atau 7,07% dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai sebesar **Rp 0,00** atau **0%** belum terealisasi dikarenakan tidak ada belanja pegawai pada Kecamatan Gambir. Pada Belanja Barang dan Jasa yang belum terealisasi sebesar **Rp 143.342.426,00** atau **7,522%**, hal ini dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Gambir Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 baru berasal dari kegiatan rutin seperti belanja makan minum rapat dan pembayaran TALI.
- Pada Belanja Modal yang tidak terealisasi sebesar **Rp6.784.135,00** atau **3,09%** dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Belum Terealisasi	Penjelasan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 6 784.135,00	merupakan sisa anggaran mati hasil negosiasi Tahun 2025.
Total	Rp 6.784.135,00	

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 1 762.176.862,00** atau **92,48%** dari total Anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp 1 905.519.288,00** dan Belanja Modal masih belum terealisasi yaitu sebesar **Rp 6.784.135,00** atau **3,09%** dari total Anggaran Belanja Modal sebesar **Rp 219 001.150,00**.

2.2 CAPAIAN KEUANGAN DAN KINERJA UTAMA DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian provinsi DKI Jakarta apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap

Realisasi Belanja

Kategori Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	~1,500,000,000.00	1,762,176,862
Belanja Modal	~250,000,000.00	212,217,015

Dan grafik di atas diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.

Item	Indikator Kinerja	Setoran	Komponen	Prioritas	Tingkat Tuntutan	Strategi	Target	Kendaraan	Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat)	INDIKATOR KINERJA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KELAYAKANAN DAN KEAMANAN	Rata	Average	Masyarakat	80-90	TW 1			90%
						TW 2	90-95	80-95	100,000%
						TW 3	90-95		
						TW 4	90-95		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat)	INDIKATOR KINERJA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KELAYAKANAN DAN KEAMANAN	Rata	Average	Masyarakat	80-90	TW 1			90%
						TW 2	90-95	80-95	100,000%
						TW 3	90-95		
						TW 4	90-95		

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Target Tahunan adalah 98,98 (Nilai) dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi adalah 96,55 (Nilai). Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai dari kedua indikator tersebut yaitu, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan samapai dengan triwulan 2 terealisasi 99,35 (Nilai) dari target 98,98 (Nilai) atau senilai 100,37 %, sedangkan untuk indikator kinerja sasaran Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi terealisasi 94,22 (Nilai) dari target 96,55 (Nilai) atau senilai 97,58 %. Jika membandingkan capaian realisasi tahun 2024 sasaran Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi tidak memenuhi target.

2.2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI

No.	MIAF DPA 2025		TARGET S/D BULAN DESEMBER			REALISASI S/D BULAN DESEMBER		
	Program	Anggaran	Kewangan		Pelaksanaan (Fisik)	Volume Satuan	Kewangan	
		Rp.	Rp.	%	%		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	240.644.272	240.644.272	100,00%	100,00%		237.200.900	99,67%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	147.330.000	147.330.000	100,00%	100,00%		140.378.800	95,28%
3	PROGRAM KOPORASI KETENTRAMAN DAN KETERTIRAN JALAN	53.246.360	53.246.360	100,00%	100,00%		52.910.000	99,37%
4	PROGRAM PENYUMBANG LUSAK PEYERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.683.299.000	1.683.299.600	100,00%	100,00%		1.543.906.877	91,72%
	TOTAL	2.124.520.438	2.124.520.438	100,00%	100,00%		1.974.393.877	97,93%

Pada tahun 2025 dari tabel capaian program dapat di lihat bahwa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 4 (empat) Program yaitu Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta 9 (sembilan) indikator program, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM), Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU, Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum, Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik dan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dan anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penenmaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD,
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penenma wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

-
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD. dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dan entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang

tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA,
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LQ.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Uraian Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000

No.	Uraian	Jumlah Uraian Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	15.000.000
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	300.000 300.000 300.000 ekstrakomtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan, dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Keputusan atas pendapatan terkait;
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat

- Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen keputusan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
- Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran

pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan)
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penemuan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

3.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andat, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, donda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

-
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKD selaku BUD dengan pihak Bank;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai;
- 7) Bahan baku
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventansasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

3.3.6.2 Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan ongkos/biaya untuk dipelihara.

b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Gedung dan bangunan
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan
- 5) Aset tetap lainnya
- 6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh

dengan lanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;

- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

- d. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

3.3.6.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.6.5 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun. kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset

tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi

3.3.6.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).

- e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

3.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.

- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6.8 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu

- a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

3.3.6.8 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas Akhir

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "adjustment" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "auditable" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu Entitas Akuntansi dan Penggabung pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Per 31 Desember 2025 mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah/kota, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 karena Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak

memiliki pendapatan.

4.1.2 Belanja

Tabel 4.1 Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025

URAIAN BELANJA	ANGGARAN 2025	REALISASI 31 Desember 2025	(%)	REALISASI 31 Desember 2024
Belanja Operasi	1.905.519.288,00	1.762.176.862,00	92,48	1.845.970.393,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.905.519.288,00	1.762.176.862,00	92,48	1.845.970.393,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	219.001.150,00	212.217.015,00	96,90	22.280.000,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.001.150,00	212.217.015,00	96,90	22.280.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	2.214.520.438,00	1.974.393.877,00	89,19	1.868.250.393,00
SURPLUS (DEFISIT)	(2.214.520.438,00)	(1.974.393.877,00)		(1.868.250.393,00)

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah/Kota yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.905.519.288,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.762.176.862,00

atau 92,48%.

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Gambir Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.762.176.862,00 dan Rp 1.845.970.393,00. Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 83.793.531,00 dari realisasi per 31 Desember 2024.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

4.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada Kecamatan Gambir Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terdapat Belanja Pegawai tahun 2025.

4.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.905.519.288,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.762.176.862,00 atau 92,48% sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp143.342.426,00 atau 7,52%, dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 baru berasal dari kegiatan rutin seperti belanja makan minum rapat dan pembayaran TALI. Untuk belanja barang dan jasa yang belum terealisasi, target realisasinya berada pada Triwulan 3 dan 4 tahun 2025.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.762.176.862,00 dan Rp 1.845.970.393,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 83.793.531,00 dari realisasi per 31 Desember 2024, hal ini dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa masih berjalan dan terdapat banyak target di Triwulan 3 dan Triwulan 4.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat disajikan pada Lampiran 1.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp219.001.150,00. Realisasi sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 212.217.015,00 atau 96,90% sehingga anggaran belanja modal tidak terealisasi yaitu sebesar Rp 6.784.135,00 atau 3,09 % dengan penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang belum terealisasi yaitu sebesar Rp 6.784.135,00 atau 3,09% merupakan sisa anggaran mati berdasarkan hasil negosiasi pengadaan.

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 212.217.015,00 dan Rp 22.280.000,00. Realisasi Belanja Modal Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 189.937.015,00 bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, hal ini dikarenakan target realisasi berada pada triwulan 3 dan 4 tahun 2025.

4.1.2.2.a Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta

Pusat tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 219.001.150,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 212.217.015,00 atau 92,48% merupakan belanja modal mebel, alat pendingin, personal computer dan home use.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 212.217.015,00 dan Rp 22.280.000,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 189.937.015,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

4.1.2.2.b Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

4.2 NERACA

4.2.1 ASET

Saldo Aset Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 8.672.812.552,00 dan Rp 9.666.175.530,00. Adapun rincian Aset adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	27.028.393,00	22.025.238,00
Aset Tetap	8.644.130.034,00	9.600.088.994,00
Aset Lainnya	1.654.125,00	44.060.298,00
Jumlah Aset	8.672.812.552,00	9.666.175.530,00

4.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Nilai Aset Lancar Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 27.028.393,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.002.155,00 atau (22,71%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 22.026.238,00 Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	19.037.361,00
Beban dibayar dimuka	14.728.483,00	10.024.843,00
Persediaan	12.299.910,00	12.001.395,00
Aset Lancar	27.028.393,00	22.026.238,00

4.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah kas yang berasal dari dana operasional meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran

yang merupakan sisa UP (Uang Persediaan) yang berada pada Kas di Bank.

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.2.1.1.2 Piutang Lain-lain yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terdapat Piutang lain-lain yang sah.

4.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Terdapat Beban di bayar dimuka sebesar Rp. 14.728.483,00 terdiri atas Beban Barang dibayar dimuka yaitu Saldo BBM dibayar dimuka Rp. 14.728.483,00 yang merupakan sisa belanja BBM per 31 Desember 2025 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Rincian nilai Beban di bayar dimuka Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat disajikan pada Lampiran 2.

4.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 12.299.910,00 dan Rp 12.001.395,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah kota dan barang yang disimpan untuk

diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Pemerintah Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir.

Persediaan akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp. 12.299 910,00 merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp 12.299 910,00.

Rincian nilai persediaan Kota Administrasi Jakarta Pusat disajikan pada lampiran 3.

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 8.644.130.034,00 dan Rp 9 600 088.994,00. Nilai Aset Tetap Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 955.958 960,00 atau 11.06% dari tahun 2024 Adapun rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2025
(KIB terlampir pada lampiran 4)

Daftar Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	634.438.534,00	634.438.534,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.742.112.759,00	2.530.495.744,00	212.217.015,00
Gedung dan Bangunan	22.298.726.250,00	22.298.726.250,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.537.925.447,00)	(2.484.735.784,00)	53.189.663,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(14.494.822.062,00)	(13.379.835.750,00)	1.114.986.313,00
Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	(0,00)	(0,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15.950.000,00)	(15.950.000,00)	0,00
Jumlah	9.844.130.034,00	9.800.088.894,00	(443.858.860,00)

Saldo Aset Tetap dapat dirinci menjadi beberapa akun aset tetap, yaitu :

4.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 634.438.534,00 dan Rp 634.438.534,00. Saldo Aset Tanah

per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari saldo Tahun 2024.

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.742.712.759,00 dan Rp2.530.495.744,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 212.217.015,00 dari Saldo Tahun 2024 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin pada Tahun 2025.

Mutasi lambah kurang aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024	Rp	2.530.495.744,00
Mutasi Penambahan		
Pembelian Peralatan dan Mesin	Rp	212.217.015,00
Jumlah Penambahan	Rp	2.742.712.759,00
Mutasi Pengurangan		
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	Rp	2.742.712.759,00

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 22.299.726.250,00 dan Rp 22.299.726.250,00. Saldo aset tetap gedung dan bangunan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 15.950.000,00 dan Rp 15.950.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan 0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun-tahun sebelumnya sejak Tahun 2023.

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp (14.494.822.062,00) dan Rp (15.880.521.534,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami tetap antara nilai per 31 Desember 2025 dan saldo tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.537.925.447,00)	(2.484.735.784,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(14.494.822.062,00)	(13.379.835.760,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(0,00)	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15.950.000,00)	(15.950.000,00)
Jumlah	(17.048.697.509,00)	(15.880.521.534,00)

4.2.1.2.7.a Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (2.537.925.447,00) dan Rp (2.484.735.784,00), mengalami kenaikan dari nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 53.189.663,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2024	Rp	(2.484.735.784,00)
Mutasi Penambahan		
Beban Penyusutan	Rp	(58.089.663)
Jumlah Penambahan	Rp	(58.089.663,00)
Mutasi Pengurangan		
Koreksi Lebih Cepat	Rp	4.900.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	4.900.000,00
Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	Rp	(2.484.735.784,00)

4.2.1.2.7.b Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (14.494.822.062,00) dan Rp (13.379.835.750,00), mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar Rp (1.114.986.312,00)

4.2.1.2.7.c Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (0,00) dan Rp (0,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.7.d Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (15.950.000,00) dan

Rp (15.950.000,00), Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 250.123.656,00 dan Rp 250.123.656,00. Nilai Aset Lainnya Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024. Aset Lainnya terbagi menjadi rincian berikut :

4.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 250.123.656,00 dan Rp 250.123.656,00. Saldo Aset Lain-lain Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari tahun 2024. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 berasal dari Aset Rusak Berat/Usang yaitu sebesar Rp. 250.123.656,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

4.2.1.3.1.a Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 250.123.656,00 dan Rp 250.123.656,00. Saldo Aset Rusak Berat/Usang Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari tahun 2024.

Rincian Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025
Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
disajikan pada lampiran 5.

4.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per
31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
masing-masing sebesar Rp (248.469.531,00) dan
Rp (206.063.358,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar
Rp (42.406.173,00) dari tahun 2024.

Penjelasan lebih lanjut saldo Saldo Akumulasi
Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

4.2.1.3.2.a Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
masing-masing sebesar Rp (248.469.531,00) dan
Rp (206.063.358,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat
per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan,
dengan rincian sebagai berikut

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang 2024	Rp	(206.063.358,00)
Mutasi Penambahan		
Beban Penyusutan 2025	Rp	(42.406.173,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(206.063.358,00)
Mutasi Pengurangan		
Jumlah Pengurangan		0,00
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang Per 31 Desember 2025	Rp	(248.469.531,00)

4.2.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.194.308,00, yang berasal dari kewajiban jangka pendek.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.194.308,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa		23.194.308,00
3.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00
	Jumlah	0,00	23.194.308,00

4.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.194.308,00. Adapun rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa		23.194.308,00
3.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00
	Jumlah	0,00	23.194.308,00

Penjelasan lebih rinci atas akun utang belanja adalah sebagai berikut :

4.2.2.1.1.a Utang Belanja Pegawai

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terdapa Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

4.2.2.1.1.b Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.194.308,00.

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang berasal dari Utang Belanja Jasa yaitu utang belanja jasa TALI atas pemakaian bulan Desember 2024 sebesar Rp. 23.194.308,00 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2025.

Untuk belanja jasa TALI atas pemakaian bulan Juni 2025 tidak lagi tercatat sebagai utang karena merupakan utang-utang yang bersifat rutin, sesuai dengan arahan BPKD Provinsi DKI Jakarta untuk utang-utang yang bersifat rutin tidak dilakukan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total asset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 8.672.812.552,00 dan Rp 9.642.981.222,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 4.4.

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional terdiri dari :

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan Hibah – LO Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Per 31 Desember 2025 tidak menerima Pendapatan Hibah – LO yang berasal dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2 **Beban**

Beban Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan akun lainnya. Beban Operasi terbagi menjadi : Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain – lain, Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 4.5

**Rekap Beban Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Operasi		1.733.980.399	1.853.210.522	(119.230.123)	(6,43)
1.	Beban Pegawai	0	0	0	0
2.	Beban Barang	227.997.780	329.204.164	(101.206.384)	(30,74)
3.	Beban Jasa	1.422.078.808	1.450.452.648	(28.373.840)	(1,96)
4.	Beban Pemeliharaan	83.903.811	63.153.710	20.750.101	32,86
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	10.400.000	(10.400.000)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.174.730.101	1.138.849.187	36.080.904	3,17
Jumlah Beban		2.908.710.499	2.991.859.719	(83.149.220)	(2,78)
Surplus/Defisit Operasional		(2.908.710.499)	(2.991.859.719)	83.149.220	(2,78)

4.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.733.980.399,00 dan Rp 1.853.210.522,00 terdiri dari :

4.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 1.733.880.399,00 dan Rp 1.853.210.522,00. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 terjadi penurunan sebesar Rp (119.230.123,00) atau (6,43%) dari Per 31 Desember 2024.

Beban Barang dan Jasa tahun per 31 Desember 2025 terdiri dari :

4.3.2.1.2.a Beban Barang

Beban Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 227.997.780,00 dan Rp 329.204.164,00.

Beban Barang per 31 Desember 2025 terjadi penurunan sebesar Rp (101.206.384,00) atau (30,74%) dari Per 31 Desember 2024.

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang – barang yang bukan merupakan Aset Tetap per 31 Desember 2025. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2025, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2025, persediaan akhir per 31 Desember 2025, belanja barang dibayar di muka dan transaksi – transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

4.3.2.1.2.b Beban Jasa

Beban Jasa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.422.078.808,00 dan Rp 1.450.452.648,00. Beban Jasa per 31 Desember 2025 terjadi penurunan sebesar Rp 28.373.840,00 atau (1,96%) dari per 31 Desember 2024.

4.3.2.1.2.c Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 83.903.811,00 dan Rp 63.153.710,00. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp 20.750.101,00 atau 32,86% dari per 31 Desember 2024.

4.3.2.1.2.d Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 10.400.000,00. Mengalami penurunan sebesar 100% dari per 31 Desember 2024.

4.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 1.174.730.100,00 dan Rp 1.138.649.197,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp 36.080.904,00 atau sebesar (3,17%)

4.3.3 Surplus/Defisit-LO

Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengelola pendapatan daerah tetapi hanya mengelola anggaran belanja (Defisit Anggaran). Defisit - LO per 31 Desember 2025 Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebesar (Rp2.908.710.499,00) Perhitungan Defisit - LO adalah sebagai berikut

Pendapatan-LO	0,00	
Beban	2.908.710.499,00	
Defisit Kegiatan Operasional		(2.908.710.499,00)
Defisit Kegiatan Non Operasional		(0,00)
Pos Luar Biasa		0,00
Defisit - LO		(2.908.710.499,00)

4.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas per 01 Januari 2025 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan Perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 8.672.812.551,00**. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 terdapat pada tabel berikut

Tabel 4.6

Rincian Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 Audited (Rp)
1.	Ekuitas Awal	9.642.981.222	10.763.427.048
2.	Surplus/Defisit - LO	(2.908.710.500)	(2.991.859.719)
3.	Mutasi RK PPKD	1.974.393.877	1.871.413.893
4.	Koreksi Ekuitas	(35.852.048)	0
5.	Ekuitas Akhir	8.672.812.551	9.642.981.222

Komponen perhitungan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal adalah sebesar Rp 9.642.981.222,00.

4.4.2 Perubahan Ekuitas

4.4.2.1 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp2.908.710.500,00) yang dijelaskan pada CaLK 4.3.3 Defisit-LO.

4.4.2.2 Mutasi RK PPKD

Mutasi RK PPKD pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sebesar Rp 1.974.393.877,00 yang terdiri dari

Uraian		Tahun 2024
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	Rp	0,00
RK PPKD – KAS	Rp	1.974.393.877,00
RK PPKD – Non KAS	Rp	0,00
Mutasi RK PPKD	Rp	1.974.393.877,00

4.4.2.3 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sebesar (Rp 35.852.048,00) yang terdiri dari :

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Penambahan	4.900.000,00
	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	4.900.000,00
1.	Koreksi Pengurangan	(40.752.048,00)
	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(40.752.048,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas		(35.852.048,00)

4.4.3 Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas. Maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sebesar Rp 9.883.394.700,00

4.4.3.1 RK PPKD

RK PPKD pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Kecamatan Gambir Sebesar Rp 1.974.393.877,00



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 STRUKTUR ORGANISASI

Secara garis besar struktur organisasi Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:



5.2 RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Untuk menangani isu strategis Kota Administrasi (Pemerataan pembangunan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal) dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kota Administrasi perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi adalah

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal"

Kemudian tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026

dirumuskan menjadi, sebagai berikut:

- Tujuan Strategis: Terwujudnya Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal, indikator kinerjanya "Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi"
- Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal, indikator kinerjanya "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi"

5.3 TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat,
5. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

8. **Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;**
9. **Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;**
10. **Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat,**
11. **Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;**
12. **Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;**
13. **Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;**
14. **Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;**
15. **Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;**
16. **Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi Jakarta Pusat;**
17. **Pelaksanaan Kesekretariatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.**
18. **Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang borkoordinasi dengan PD/UKPD;**
19. **Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan**
20. **Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.**

Fungsi tambahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
8. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ikhtisar Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Belanja Daerah untuk periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.974.393.877,00 atau sebesar 92,93% dari yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.124.520.438,00
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah Rp 8.672.812.551,00 dan Kewajiban sebesar Rp 0,00 sehingga Ekuitas (Kekayaan Bersih) Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 8.672.812.552,00 sedangkan Ekuitas LO sebesar Rp 6.698.418.675,00 dan RK PPKD adalah sebesar Rp 1.974.393.877,00

3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ekuitas Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp 8.672.812.552,00
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan sebesar Rp (2.906.710.499,00)

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Jakarta, 15 Juni 2026

Camat Kecamatan Gambir.



M. Iqbal

NIP 197604061994121001



KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

NERACA

PER 41 DE SEPTEMBER 2015 DAN 2024

References

REKAPITULASI	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET	42.1		
ASET LANCAR	42.1.1		
Kas dan Setara Kas	42.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Diterima		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibebaskan Pengembalian		0,00	0,00
Agunan yang Belum Diterima		0,00	0,00
Kas di Bank	42.1.1.1	0,00	0,00
Sisa UP	42.1.1.1	0,00	0,00
Kas Lunas		0,00	0,00
Kas di Bank	42.1.1.1	0,00	0,00
Lang. Panjang		0,00	0,00
Sisa 1.5		0,00	0,00
Sisa 1.1		0,00	0,00
Kas Lunas		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Lang. Panjang		0,00	0,00
Jasa Ganti di SKPD yang Belum Diterima		0,00	0,00
Agunan di SKPD yang Belum Diterima		0,00	0,00
PPH 21 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 22 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 23 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 26 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 10 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 11 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 12 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 13 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 14 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 15 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 16 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 17 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 18 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 19 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 20 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 21 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 22 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 23 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 24 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 25 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 26 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 27 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 28 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 29 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 30 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 31 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 32 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 33 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 34 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 35 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 36 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 37 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 38 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 39 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 40 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 41 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 42 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 43 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 44 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 45 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 46 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 47 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 48 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 49 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 50 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 51 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 52 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 53 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 54 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 55 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 56 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 57 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 58 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 59 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 60 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 61 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 62 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 63 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 64 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 65 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 66 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 67 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 68 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 69 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 70 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 71 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 72 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 73 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 74 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 75 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 76 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 77 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 78 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 79 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 80 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 81 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 82 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 83 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 84 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 85 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 86 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 87 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 88 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 89 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 90 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 91 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 92 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 93 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 94 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 95 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 96 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 97 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 98 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 99 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 100 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 101 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 102 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 103 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 104 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 105 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 106 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 107 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 108 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 109 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 110 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 111 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 112 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 113 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 114 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 115 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 116 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 117 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 118 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 119 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 120 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 121 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 122 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 123 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 124 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 125 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 126 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 127 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 128 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 129 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 130 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 131 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 132 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 133 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 134 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 135 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 136 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 137 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 138 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 139 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 140 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 141 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 142 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 143 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 144 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 145 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 146 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 147 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 148 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 149 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 150 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 151 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 152 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 153 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 154 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 155 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 156 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 157 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 158 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 159 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 160 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 161 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 162 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 163 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 164 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 165 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 166 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 167 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 168 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 169 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 170 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 171 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 172 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 173 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 174 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 175 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 176 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 177 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 178 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 179 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 180 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 181 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 182 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 183 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 184 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 185 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 186 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 187 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 188 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 189 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 190 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 191 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 192 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 193 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 194 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 195 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 196 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 197 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 198 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 199 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 200 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 201 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 202 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 203 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 204 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 205 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 206 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 207 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 208 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 209 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 210 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 211 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 212 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 213 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 214 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 215 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 216 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 217 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 218 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 219 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 220 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 221 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 222 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 223 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 224 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 225 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 226 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 227 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 228 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 229 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 230 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 231 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 232 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 233 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 234 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 235 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 236 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 237 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 238 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 239 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 240 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 241 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 242 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 243 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 244 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 245 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 246 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 247 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 248 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 249 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 250 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 251 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 252 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 253 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 254 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 255 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 256 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 257 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 258 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 259 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 260 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 261 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 262 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00



PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

* *Journal of Health Politics, Policy and Law*



KECAMATAN GAMBIR - JAKPI N

NERAC

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

11.4.1.4.5	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Bayar Jangka Panjang		0,00	0,00
Lapang Penjual Anonim		0,00	0,00
Tuntutan Cukai Keluaran Asas		0,00	0,00
Komitmen dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kikasan dan Dikawatirnya Denda Asas		0,00	0,00
Kerjasama Pemeliharaan		0,00	0,00
Bantuan Guna Nombor Berpam Surah Guna		0,00	0,00
Kerjasama Penyelidikan Penyelidikan		0,00	0,00
Aset Kikasan Denda dan Denda Denda		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.2.1.1	250.123.456,00	250.123.456,00
Aset Bunk Beras Usang	1.2.1.1.1	250.123.456,00	250.123.456,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam		0,00	0,00
Operasional Pemeliharaan		0,00	0,00
Aset Tetap Belum Mutakhir		0,00	0,00
Aset Tetap Belum Disiapkan Mutakhir		0,00	0,00
Aset Tetap Fungsional		0,00	0,00
Aset Lain-lain dan BUKU		0,00	0,00
Tuntutan Pemeliharaan yang belum disiapkan		0,00	0,00
Aset di BP CTR Laksana		0,00	0,00
Aset Lain-lain dan BUKU		0,00	0,00
Kerjasama Pemeliharaan		0,00	0,00
Aset yang Belum Disiapkan Mutakhir		0,00	0,00
Tuntutan Pemeliharaan LMK Angkutan		0,00	0,00
Tuntutan Pemeliharaan		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00
Aset komposisi Pemeliharaan BUKU Kertas		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rp. juta)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	4.1.1.2.2	(218.403.531,00)	(206.063.358,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Baur Usang	4.2.1.2.2.3	(218.403.531,00)	(206.063.358,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsentrasi Perampasan Waktu dan Lain-lain Rangkaian Koefisien Usang dan Usang (KUBKUB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Hanyutkan Sampunya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Perekonstruksi Majalah Perbaikan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dipastikan Dalam Operasional Perencanaan		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.2.1.3	1.654.125,00	44.066.295,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengembangan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET	4.2.1	8.672.012.553,00	9.666.179.536,00
KEWAJIBAN	4.2.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.2.1		
Utang Perhitungan Pajak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Pajak		0,00	0,00
Utang Pajak Bumi dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Pajak Bumi dan Bangunan Kewajiban		0,00	0,00
Utang Pajak Bumi dan Bangunan Kewajiban		0,00	0,00
Utang Pajak Bumi dan Bangunan Kewajiban		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 24		0,00	0,00
Utang PPh 24 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 28		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN GAMBIR JARPUK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

Rincian Neraca

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh Sub SKPD dan PKPD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh dan SKPD dan PPLO		0,00	0,00
Utang PPh Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Lain-lain		0,00	0,00
Utang Bank Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Lain-lain		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kekurangan Penyalangan Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak		0,00	0,00
Serikat Ketersediaan Pembayaran dari Pihak I		0,00	0,00
Utang Mula Perputaran Produk Pemda dan Pihak III		0,00	0,00
Utang Mula Utang Perputaran dari Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Hasil Pajak/Retribusi Kekayaan Daerah Yang Dipertahankan		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Hasil dari Pembayaran Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Hasil Lelang, Tawar-menawar, Reklamasi		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Hasil dan Pembayaran Kekayaan Daerah Bangun, Guna Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Dirombak Dimasak Hasil dari Pembayaran Kekayaan Daerah Bangun Sewa Guna		0,00	0,00



KECAMATAN GAMBIR - JAWA S

FEB 11 DESEMBER 2025 DAN 2024

15.04-2020



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN GAMBIR - JAKPUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Lampiran 1a

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja barang Fisik		0,00	0,00
Utang Belanja Mobil Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kebutuhan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembiayaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Pembiayaan Kewajiban Belanja Tercatat tidak Kewajiban		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Pembiayaan Kewajiban Belanja Tercatat tidak Kewajiban		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Daerah		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.1	0,00	23.184.368,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang dari Pembiayaan Program Utang Negeri		0,00	0,00
- Utang dari Pembiayaan Program Utang Negeri - Jangka Panjang		0,00	0,00
BKR DSI A 1247 (Project LUMPUJI III)		0,00	0,00
BKR DSI A 1267 (Stasiun MRT)		0,00	0,00
Utang PHN		0,00	0,00
Utang dari Pembiayaan Program Utang Negeri		0,00	0,00
- Utang dari Pembiayaan Program Utang Negeri - Jangka Panjang		0,00	0,00
BKR DSI A 1247 (Project LUMPUJI III)		0,00	0,00
BKR DSI A 1267 (Stasiun MRT)		0,00	0,00
Sumber Utang, sesuai Kebijakan Pembiayaan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsumsi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.2.2	0,00	23.194.008,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.2	0,00	23.194.008,00
EKUITAS	1.2.1		
EKUITAS			
Ekuitas		6.408.114.678,00	7.771.587.424,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Ribu)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas sesuai dengan perhitungan		8.974.393.877,00	1.651.413.893,00
RK PPKD Cw		8.974.393.877,00	1.651.254.193,00
RK PPKD Sot Rzs		0,00	157.700,00
Jumlah Ekuitas	423	8.974.393.877,00	1.651.411.893,00
Jumlah Ekuitas		8.974.393.877,00	1.651.411.893,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		8.974.393.877,00	1.651.411.893,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 15 Mei 2026
CAMAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS PROVINSI DKI
JAKARTA


NTP 197603061964 2 001



Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KECAMATAN CASIBIR - JAKPUR

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Rp. dalam jutaan

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	%	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.1				
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Kontribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengalokasian Hakungan Daerah yang Diperdagang		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil dari PMU yang Baru		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Operasi Khusus dan Dana Tambahan Insentif		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Koordinasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Lokal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Free Alokasi Daerah (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Free Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bantuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil dari Pendapatan Beras dan Kebutuhan Pemenuhan		0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sama		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bangun		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Khusus dan Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tetap		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perbaikan dan Modernisasi	5.1.2.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Investasi dan Pengadaan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
LAPORAN REALISASI LANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KECAMATAN GAMBIR JAKPUS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2024

Tabel 3.1.a.1

U R A I A N	U N I T S	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jalan Tol, dan Jembatan	4.1.2.2	0,00	0,00	< 10	0,00
Belanja Modal Alat Transportasi		0,00	0,00	< 10	0,00
Belanja Modal Alat Listrik		0,00	0,00	< 10	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		219.000.150,00	212.317,405,00	96,90	22.280.000,00
BELANJA TIDAK TERDILG	4.1.2				
Belanja Tidak Tersedia		0,00	0,00	< 60	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDILG		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	1,00	0,00
Belanja Bantuan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	4.1.2	219.000.150,00	212.317,405,00	96,90	22.280.000,00
SURPLUS/DEFISIT	1.1.2	(2.124.520.438,00)	(1.974.202.877,00)		(1.868.290.391,00)
PENDAPATAN DAERAH	1.1.2				
PENERIMAAN PENDAPATAN					
Sisa Laba Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengalihan Kepemilikan Daerah yang Dipersekal		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pengganti Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Hibah dan Bantuan Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Partisipasi Keuangan Daerah dengan Ketersediaan Pembiayaan Perantara Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Luar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PENDAPATAN					
Pembayaran Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Modal Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Gaji dan Gaji Lain-lain yang telah terutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pengganti Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Lainnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Lainnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Gaji dan Gaji Lain-lain yang telah terutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Lainnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Laba Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan		(2.124.520.438,00)	(1.974.202.877,00)		(1.868.290.391,00)

Catatan: Laporan ini merupakan informasi umum dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

Jakarta, 15 Juni 2024
 CAHAY KECAMATAN GAMBIR JAKPUS

NIP. 19760061994121001



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Ribu)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	4.4.1		
<u>Ekuitas - LO</u>			
Tuntas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		7.771.567.429,00	9.784.361.454,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		1.871.413.893,00	1.479.063.997,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	4.4.1	9.642.981.222,00	10.763.425.048,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		1.871.413.893,00	1.479.063.997,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(1.871.413.893,00)	(1.479.063.997,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
Jumlah Awal Ekuitas Awal		9.642.981.222,00	10.763.425.048,00
PERUBAHAN EKUITAS	4.4.2		
Salplus/Defisit LO	4.4.2.1	(2.904.310.495,00)	(2.991.854.719,00)
Mutasi RK PPKD	4.4.2.2	1.974.393.877,00	8.713.280,00
Koreksi Ekuitas	4.4.2.3	(15.837.048,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(976.168.670,00)	(1.120.445.826,00)
EKUITAS AKHIR	4.4.3		
Ekuitas - LO		8.666.812.552,00	7.771.567.429,00
RK PPKD	4.4.3.1	1.974.393.877,00	1.871.413.893,00
EKUITAS AKHIR		8.672.812.552,00	9.642.981.222,00

Atas Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 15 Juni 2026

CAMAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

M. IQBAL

NIP. 197601061994121001



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	4.1.1				
PENDAPATAN ASLI RAPORAH PADANG		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Dagang-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Gedasa Bawah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
uang Penghasilan Kewajiban Dasar (uang Tunggak-Nomor 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah - LD		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN BLUSURPER-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN PAD BUKAN YANG SAH-LD	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hutan-LD	1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Dana - LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan sumber kekayaan pemerintah Pusat dan Daerah-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00
KEBUN	4.1.2				
BEBAN OPERASIONAL	4.1.2.1	1.753.969.400,00	1.653.219.507,00	100.749.893,00	6,10
Beban Pegawai	4.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Material-LD	4.1.2.1.2	1.654.990.000,00	1.552.240.500,00	102.749.500,00	6,33
Bahan Bangunan	4.1.2.1.2.2	227.607.780,00	227.224.164,00	383.616,00	0,17
Bahan Lain-lain	4.1.2.1.2.3	1.427.382.220,00	1.325.016.336,00	102.365.884,00	7,18
Jasa Perawatan	4.1.2.1.2.4	30.000.000,00	65.999.600,00	35.999.600,00	120,00
Beban Lainnya-LD	4.1.2.1.2.5	0,00	10.420.000,00	10.420.000,00	100,00
Beban Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Listrik		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan Bakar		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lainnya-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pengawasan dan Amortisasi	4.1.2.2	1.174.936.197,00	1.129.845.197,00	45.090.900,00	3,90
Beban Pemeliharaan dan Amortisasi		11.659.100,00	18.940.500,00	7.281.400,00	62,56
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.163.250.000,00	1.110.900.000,00	52.350.000,00	4,51
Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dan Amortisasi Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dan Amortisasi Lainnya		1.151.600,00	1.110.600,00	41.000,00	3,56
Beban Amortisasi dan Biaya Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dan Amortisasi Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dan Amortisasi Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00



PULSA RINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110800 - KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

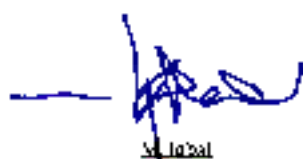
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Ratus Ribu)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
BEBAN	472				
Beban Mekanik Sewerage		200	0,00	0,00	0,00
Beban Koneksi Ruang Sertifikat dan dalam pengalihan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		2.000.210.294,00	2.001.354.719,00	(03.144.425,00)	(2,78)
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(2.000.210.294,00)	(2.001.354.719,00)	03.144.425,00	(2,78)
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Perbaikan Pemukiman, Pekerjaan Aspal		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Perbaikan bangunan Aspal		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dan Kegiatan Non Operasional Lainnya LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghambatan Koneksi Dalam Pekerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LULU BULSA					
MULAI TAHUN TERDAHULU		0,00	0,00	0,00	0,00
Mulai Tahun Terdahulu		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LULU BULSA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT LO	473	(2.000.210.294,00)	(2.001.354.719,00)	03.144.425,00	(2,78)

Laporan ini merupakan Laporan Keuangan yang dikompilasi dengan data yang terdapat dalam laporan ini

Jakarta, 17 Juni 2026
CAMAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS


M. J. J. J.

NIP. 197601061994121001